DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN SAKIP 2021

4. Dokumen Renja (RKT)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

TAHUN 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NGANJUK

Jl. Dermojoyo No. 30 Nganjuk Tel. (0358) 321150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari perencanaan OPD dimana anggaran yang telah diajukan perlu penambahan atau pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang muncul karena dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena didalam dokumen perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan, dengan harapan adanya konsistensi mulai dari merencanakan kinerja dan perubahan anggaran sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran pada akhir tahun.

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan diatas, maka untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan optimalisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran melalui program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 merupakan penjabaran dari langkah-langkah perencanaan strategis yang akan ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran dari Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana kerja ini juga dijelaskan pula tentang pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2021 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01).
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020.

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk memberikan gambaran dalam mengimplementasikan perubahan program dan kegiatan.
3. Sebagai bentuk perencanaan perubahan yang berbasis pada skala prioritas kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Rencana strategis merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana strategis terdapat indikator dan target yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap tahunnya.

Adapun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 yang memuat indikator keberhasilan yang dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total
b. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi
c. Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan wajib yaitu urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

1) Belanja Pegawai (Gaji) Rp 4.068.771.000,- untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan terealisasi 1.847.686.157,- atau 45,41%.

B. Belanja Langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

a) Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.544.950,- dan terealisasi sebesar Rp 1.462.650,- atau 57,47%. Kegiatan ini menghasilkan 3 dokumen yaitu Renja, Renstra dan Sakip.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.545.200,- dan telah terealisi sebesar Rp 1.672.650,- atau 65,72% Kegiatan ini menghasilkan 3 Dokumen yaitu LKPJ, LPPD dan LkjiP.

c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.035.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp 905.000,- atau 22,42%. Kegiatan ini diperuntukkan pengadaan 10 Jenis komponen listrik.

d) Penyediaan Bahan Logistik kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 62.108.840,- dan telah terealisasi sebesar Rp 22.224.150,- atau 35,78%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, mamin pegawai dan peralatan bahan pembersih

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 29.346.580,- dan telah terealisasi sebesar Rp6.262.000,- atau 21,24%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa kop surat, buku-bukupendaftaran dan pengambilan KK, KTP, Akta-aktacatatansipil, amplop dinas, dan kebutuhan penggandaan administrasi kantor.

f) Fasilitas kunjungan tamu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.630.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 952.000,- atau 26,23%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja mamin dan snack tamu.

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.724.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 4.540.200,- atau sebesar 5,36%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

h) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.095.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 811.660,- atau 6,20%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja Pengiriman surat dinas dan materai .

i) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 159.600.000,- dan telah terealisasi Rp 65.257.561,- atau sebesar 40,89%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya kebutuhan tambah daya listrik 33.600 W, Internet 50 Mbps dan kebutuhan telepon.

j) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 118.200.000,- dan telah terealisasi Rp 21.600.000,- atau sebesar 18,27%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya jasa pelayanan umum kantor.

k) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 58.589.100,- dan telah terealisasi Rp 9.527.489,- atau sebesar 16,25%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan .

g) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 58.589.100,- dan telah terealisasi Rp 9.527.489,- atau sebesar 16,25%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan

f) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.250.000,- dan telah terealisasi Rp 3.102.500,- atau sebesar 15,32%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.

h) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.173.000,- dan telah terealisasi Rp 4.972.000,- atau sebesar 44,50%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor.

1. Program Pendaftaran penduduk
a) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp390.821.100,- dan telah terealisir sebesar Rp162.000.000,- atau 41,45%. Kegiatan ini untuk peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk yaitu dengan kegiatan perekaman KTP dengan jemput bola dan Disabilitas.

3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
a) Penyusunan Profil data perkembangan dan proyekasi kependudukan serta kebutuhan yang lain.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.857.700,- dan telah terealisir sebesar Rp 587.500,- atau 7,48%. Kegiatan ini untuk Penyusunan profil kependudukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, dapat kita analisis bahwa masih banyak kegiatan yang belum kami realisasi secara maksimal, sehingga untuk triwulan berikutnya kami terus berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

2.2.1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk Urusan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat program dan kegiatan prioritas yaitu Program dan kegiatan prioritas yang dituangkan kedalam sub kegiatan sebagai pendukung tercapainya prioritas nasional yaitu diantaranya sub kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik 2021:

1. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA yang mana kegiatan dimaksud untuk menganalisis dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dinas dan penggunaannya.
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang mana kegiatan dimaksud adalah penyusunan laporan capaian kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan khususnya kegiatan yang didanai dari DAKNF.
3. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
   Yang dimaksud sub kegiatan ini adalah mengaluasi hasil kerja selama tahun berjalan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
   Sosialisasi Peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan sebagai salah satu untuk mendukung tercapaianya program prioritas.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.
   Kegiatan ini untuk pelaksanaan pengadaan peralatan penunjang pelayanan administrasi kependudukan berupa alat cetak KTP-El dan KIA.
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
   Kegiatan yang dimaksud adalah fasilitasi untuk penyampaian atau penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi nasional, rapat koordinasi teknis, bimbingan teknis dll.
7. Penyelenggaraan jasa surat menyurat.
   Yang dimaksud dengan kegiatan ini adalah sarana /fasilitas untuk pengiriman dokumen kependudukan dengan menggunakan jasa pengiriman.

Selain kegiatan-kegiatan yang didanai dengan DAKNF untuk pencapaian prioritas didukung juga dengan Program dan kegiatan yang didanai ditungkan dedalam Program Pendaftaran penduduk. Kegiatan pelayanan Pendaftaran penduduk, sub kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk yang mana dalam sub kegiatan tersebut salah satunya adalah pelayanan keliling ke desa-desa dalam rangka pelayanan dokumen adminduk kepada penyandang difabel atau penduduk rentan administrasi.
Selain itu ada juga Program pengelolaan Profil Kependudukan, kegiatan pPenyusunan Profil kependudukan, sub kegiatan Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2023 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk difokuskan pada:

3.1.1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ditekankan pada :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga
2. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak
4. Pelayanan penerbitan Biodata Penduduk
5. Pelayanan pindah datang penduduk
6. Penanganan penduduk rentan administrasi

3.1.2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

1. Pelayanan penerbitan akta kelahiran
2. Pelayanan penerbitan akta kematian
3. Pelayanan penerbitan akta perkawinan
4. Pelayanan penerbitan akta perceraian

3.1.3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ditekankan pada:

1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Perjanjian Kerja Sama)
3. Mengembangkan inovasi pelayanan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih

operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, yaitu:

"Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nganjuk"

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut **"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan" dan "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan".**

3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ruang lingkup kegiatannya. Dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung

  Belanja Pegawai

  1) Belanja Pegawai (Gaji) Rp 4.068.771.000,- untuk belanja gaji dan tunjangan PNS.

C. Belanja Langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

a) Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.544.950,-. Kegiatan ini menghasilkan 3 dokumen yaitu Renja, Renstra dan Sakip.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.545.200,-. Kegiatan ini menghasilkan 3 Dokumen yaitu LKPJ, LPPD dan LkjiP.

c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.035.900,- .

Kegiatan ini diperuntukkan pengadaan 10 Jenis komponen listrik.

d) Penyediaan Bahan Logistik kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 62.108.840,- . Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, mamin pegawai dan peralatan bahan pembersih

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 29.346.580,-. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa kop surat, buku-bukupendaftaran dan pengambilan KK, KTP, Akta-aktacatatansipil, amplop dinas, dan kebutuhan penggandaan administrasi kantor.

f) Fasilitas kunjungan tamu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.630.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja mamin dan snack tamu.

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.724.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

h) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.095.000,- .

Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja Pengiriman surat dinas dan materai .

i) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 159.600.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa biaya kebutuhan tambah daya listrik 33.600 W, Internet 50 Mbps dan kebutuhan telepon.

j) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 118.200.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa biaya jasa pelayanan umum kantor.

k) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 58.589.100,- . Bentuk kegiatan ini berupa biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan .

g) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 58.589.100,- . Bentuk kegiatan ini berupa biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan

f) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.250.000,-
Bentuk kegiatan ini berupa biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.

h) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.173.000,-
Bentuk kegiatan ini berupa biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor.

2. Program Pendaftaran penduduk

a) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp390.821.100,- Kegiatan ini untuk peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk yaitu dengan kegiatan perekaman KTP dengan jemput bola dan Disabilitas.

3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a) Penyusunan Profil data perkembangan dan proyekasi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.857.700,- Kegiatan ini untuk Penyusunan profil kependudukan.

Untuk mencapai sasaran **"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan" dan "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan"** ditetapkan program pada urusan Administrasi kependudukan yang bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk.

Adapun program pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Adapun Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RKPD Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN NGANJUK

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU/BERKURANG	JUMLAH KEGIATAN BARU/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN			
1.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	3	3	26	8	8	7.457.162.000	4.877.473.670	7.422.486.670	0	0	DISDUKCAPIL

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN NGANJUK

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		JUMLAH PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daearah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daearah	Penyusunan dokumen renja, renstra dan sakip	3 dokumen	3 dokumen	2.544.950	2.336.450	Refocusing 208.500
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen rencana anggaran	1 dokumen	1 dokumen	2.545.400	2.283.400	Refocusing : 262.000 DAKNF 47.478.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggran	1 dokumen	1 dokumen	2.574.200	2.312.200	
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan LKPJ, LPPD, LKjiP	3 dokumen	3 dokumen	2.540.200	2.336.700	Refocussing 208.500 DAKNF 259.575.000
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan	14 bulan	14 bulan	3.849.742.000	3.847.823.000	Pengurangan : 1.919.000
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan yang disusun	3 laporan	3 laporan	2.590.700	2.314.700	Refoccusing : 276.000

		laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun SKPD						
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 jenis	10 jenis	4.035.900	4.035.900	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia berupa alat tulis kantor, makan minum pegawai dan peralatan vahan pembersih	40 macam	40 macam	62.180.840	62.180.840	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	16 macam	16 macam	29.346.580	141.846.580	Penambahan DAU : Press mika atau sampul dokumen kependudukan 112.500.000
		Fasilitas kunjungan Tamu	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	6 kali	6 kali	3.630.000	3.630.000	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	84.724.000	58.842.000	Refoccusing : 25.882.000 DAKNF : 185.400.000
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah material surat menyurat atau jasa paket pengiriman	3 jenis	3 jenis	13.095.000	3.095.000	DAKNF : 198.100.000 DAU (geser): 10.000.000
		Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air	Kebutuhan jasa listrik 3360 Watt, internet 50	3 jenis	3 jenis	159.600.000	159.600.000	

		dan listrik	dan listrik	mbps dan kebutuhan telepon					
		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Gedung kantor 5 unit	12 bulan	12 bulan	118.200.000	118.200.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional kantor yang terpelihara	6 unit	6 unit	58.589.100	58.589.100	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin terpelihara	20 unit	20 unit	20.250.000	60.250.000	Penambahan DAU : servis printer KTP el 30.000.000 Servis server : 10.000.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kantor yang terpelihara	5 unit	5 unit	11.173.000	11.173.000	
		Program Pendaftaran Penduduk	**Program Pendaftaran Penduduk**						
		Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan permohonan pendaftaran penduduk	20 kecamatan	20 kecamatan	392.921.100	404.471.100	Refocusing : 450.000 Penmbahan Hr THL 12.000.000
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**						

		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil kependudukan	48 eksemplar/buku	48 eksemplar/buku	57.257.700	33.077.700	Refosucing : 24.180.000
							4.877.473.670	**7.422.486.670**	

BAB V
P E N U T U P

4.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Cakupan penerbitan KK
b. Cakupan penerbitan KTP
c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun.
d. Cakupan penerbitan akta kematian

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran, maka untuk triwulan berikutnya kami terus berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga apa yang kita rencanakan dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Nganjuk, September 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, AP
Pembina TK I
NIP. 197503111 199311 1 001